

Konflik Tak Seimbang Etnis Rohingya dan Etnis Rakhine di Myanmar

Tri Joko Waluyo*

Abstract

This paper aims to describe the unequal conflict that occurred between ethnic Rohingya and Rakhine in Myanmar and explain the causes and triggers of the conflict. The conflict between the two ethnic groups then erupted into violence and murder against ethnic Rohingya is happening in much of the sense of justice. It results in an unequal conflict between ethnic Rohingya and Rakhine in Myanmar are latent and can occur at any time although it is only triggered by a simple problem.

Keywords: *Unequal Conflict, Ethnic Rohingya, Ethnic Rakhine, Violence.*

Pendahuluan

Berita tentang Muslim Rohingya timbul menyusul konflik sektarian yang terjadi antara etnis Rohingya yang sebagian besar adalah Muslim dan etnis Rakhine yang mayoritas merupakan penganut Buddha. Penyebab konflik itu sendiri tak begitu jelas. Namun, beberapa sumber menyebutkan bahwa kerusuhan itu merupakan buntut salah satu peristiwa perampokan dan pemerkosaan terhadap perempuan Rakhine bernama Ma Thida Htwe pada 28 Mei 2012. Kepolisian Myanmar sebenarnya telah menahan dan memenjarakan 3 orang tersangka pelaku yang kebetulan dua di antaranya adalah etnis Rohingya. Namun, tindakan itu ternyata tak cukup mencegah terjadinya kerusuhan di negara bagian Rakhine yang terletak di bagian barat Myanmar itu. Pada tanggal 4 Juni, terjadi penyerangan terhadap bus yang diduga ditumpangi pelaku pemerkosaan dan kerabatnya. Tercatat 10 orang Muslim Rohingya tewas. Sejak itu, kerusuhan rasial di Rakhine pun meluas.

Sebenarnya konflik antara etnis Rohingya dan Rakhine kerap terjadi sejak puluhan tahun silam. Apa sebenarnya akar masalahnya? Salah satu akar konflik menahun itu adalah status etnis minoritas Rohingya yang masih dianggap imigran ilegal di Myanmar. Pemerintah Myanmar tak mengakui dan tak memberi status kewarganegaraan kepada mereka. Sebagai akibat tiadanya kewarganegaraan, etnis Rohingya tak bisa mengakses pendidikan, layanan kesehatan, dan bahkan pekerjaan yang layak. Mereka betul-betul

* Dosen Jurusan Hubungan Internasional FISIP Universitas Riau

terabaikan dan terpinggirkan. Maurice Duverger menjelaskan bahwa dalam setiap kelompok masyarakat senantiasa diwarnai oleh konflik dan integrasi secara fluktuatif. Konflik berubah menjadi integrasi apabila terjadi kompromi yang didasari oleh rasa keadilan.¹

Pemerintah Myanmar tak mengakui kewarganegaraan etnis Rohingya karena menganggap kelompok Muslim ini bukan merupakan kelompok etnis yang sudah ada di Myanmar sebelum kemerdekaan Myanmar pada 1948. Hal itu ditegaskan kembali oleh Presiden Myanmar, Thein Sein, dalam *Al Jazeera*, 29 Juli 2012 bahwa Myanmar tak mungkin memberikan kewarganegaraan kepada kelompok Rohingya yang dianggap imigran gelap dan pelintas batas dari Bangladesh itu.

Akar konflik yang lain adalah adanya kecemburuan terhadap etnis Rohingya. Populasi etnis Muslim Rohingya dalam beberapa dasawarsa ini terus meningkat. Tentu saja, hal ini menyebabkan kecurigaan dan kecemburuan pada etnis mayoritas Rakhine. Bagi mereka, keberadaan etnis Rohingya pun sangat mungkin dianggap “kerikil dalam sepatu”, yakni sesuatu yang terus mengganggu. Keberadaan etnis Rohingya dianggap mengurangi hak atas lahan dan ekonomi, khususnya di wilayah Arakan, Rakhine yang menjadi pusat kehidupan etnis Muslim ini.

Dari aspek tertentu Rohingya tidak tepat disebut “etnis” karena kata itu merupakan label politis yang digunakan untuk memperjuangkan keberadaan kelompok tersebut di Myanmar. Beberapa sejarawan Myanmar mengatakan bahwa nama Rohingya baru muncul pada tahun 1950-an, setelah kemerdekaan Myanmar. Lalu, siapa sebenarnya mereka?

Dalam catatan PBB, Rohingya hanya disebut sebagai penduduk Muslim yang tinggal di Arakan, Rakhine, Myanmar. Dari sudut kebahasaan, bahasa yang diklaim sebagai bahasa Rohingya sebenarnya termasuk ke dalam rumpun bahasa Indo-Eropa, khususnya kerabat bahasa Indo-Arya. Lebih detail lagi, bahasa Rohingya dikategorikan sebagai bahasa-bahasa Chittagonia yang dituturkan oleh masyarakat di bagian tenggara Bangladesh. Sementara itu, kebanyakan bahasa di Myanmar tergolong rumpun Tai Kadal, Austroasiatik, atau Sino-Tibetan. Jadi, jelas bahwa kelompok etnis Rohingya merupakan keturunan etnis Bengali, khususnya sub-etnis Chittagonia yang tinggal di Bangladesh tenggara.

Kemunculan pemukiman Muslim di Arakan sebagai cikal bakal kelompok Rohingya terlacak sejak zaman Kerajaan Mrauk U, khususnya pada zaman Raja

¹ Duverger, Maurice, Sosiologi Politik, PT. Rajawali Grafindo Persada, Jakarta, 1998.

Narameikhla (1430-1434). Setelah dibuang ke Bengal, Narameikhla lalu menguasai kembali Mrauk U berkat bantuan Sultan Bengal. Seiring dengan berkuasanya Narameikhla, masuk pula penduduk Muslim dari Bengal ke wilayah Arakan, Rakhine. Dalam perkembangannya, jumlah pemukim Muslim dari Bengal terus bertambah, terutama ketika Inggris menguasai Rakhine. Karena kurangnya populasi di Rakhine, Inggris memasukkan banyak orang Bengali ke Rakhine untuk bekerja sebagai petani. Oleh karena itu, sampai saat ini pula, kebanyakan orang Rohingya bekerja di sektor agraris.

Ketika Inggris melakukan sensus penduduk pada 1911, pemukim Muslim di Arakan sudah berjumlah 58 ribu orang. Jumlah itu terus bertambah pada tahun 1920-an ketika Inggris menutup perbatasan India, sehingga orang Bengali memilih masuk ke Rakhine. Sejak tahun-tahun ini pulalah mulai timbul konflik dengan penduduk lokal yang mayoritas merupakan penganut Buddha. Bertambahnya jumlah penduduk migrant membuat penduduk lokal khawatir.

Keberadaan Etnis Rohingya di Myanmar

Apakah istilah Rohingya baru muncul pada tahun 1950-an? Sejarawan Jacques P. Leider mengatakan bahwa pada abad ke-18 ada catatan seorang Inggris yang bernama Francis Buchanan-Hamilton yang sudah menyebutkan adanya masyarakat Muslim di Arakan. Mereka menyebut diri mereka "Rooinga". Ada yang mengatakan bahwa istilah ini berasal dari kata "*rahma*" (rahmat) dalam bahasa Arab atau "*rogha*" (perdamaian) dalam bahasa Pashtun. Selain itu, ada pula yang mengaitkannya dengan wilayah Ruha di Afghanistan yang dianggap sebagai tempat asal Rohingya.

Dengan demikian, lepas dari apakah Rohingya merupakan sebuah etnis atau tidak, dan apakah termasuk ke dalam etnisitas Myanmar atau tidak, sudah jelas bahwa Rohingya merupakan komunitas migrant dari Bangladesh yang sudah ratusan tahun tinggal di Arakan, Rakhine, Myanmar. Sebagai komunitas yang sudah lama menetap di sebuah wilayah yang kebetulan kini menjadi bagian dari negara Myanmar, tentu saja sudah selayaknya mereka mendapatkan hak-hak dasar mereka, terutama status kewarganegaraan. Meskipun demikian, sikap pemerintah Myanmar sudah jelas seperti yang disampaikan Thein Sein bahwa Myanmar tak mungkin memberikan kewarganegaraan kepada Rohingya. Namun, Myanmar menawarkan solusi berupa pengiriman ribuan orang Rohingya ke negara lain atau tetap tinggal di Arakan, tetapi berada di bawah pengawasan PBB. Jadi,

kelihatannya etnis Rohingya masih belum bisa bernapas lega sampai beberapa tahun mendatang.

Muslim Rohingya berjumlah 20% dari total penduduk Myanmar yang berjumlah 55 juta jiwa. Mereka menempati provinsi Arakan. Provinsi ini menjadi bagian dari negeri Muslim sejak abad ke-7 M di bawah kepemimpinan Harun ar-Rasyid. Sepanjang tahun 1430-1784 M, kaum Muslim memimpin negeri ini. Tahun-tahun setelahnya, raja Burma menduduki wilayah Arakan. Sejak saat itu lah bumi Arakan yang damai berubah menjadi mencekam. Pembunuhan-pembunuhan terhadap Muslim Rohingya dilakukan, harta benda kaum Muslim dihancurkan dan mereka dikirim ke penjara-penjara.

Pada tahun 1842 M, Inggris menduduki wilayah ini dan memasukkan Arakan di bawah negara persemakmuran Inggris-India. Pada tahun 1937 M Inggris menggabungkan kembali Arakan dengan negeri Budha. Supaya Muslim terkuasai, umat Budha diprovokasi untuk menindas Muslim Rohingya. Pada tahun itu, Inggris mempersenjatai Budha. Tahun 1942 penyerangan-pernyerangan terhadap Muslim Rohingya dilakukan kembali.

Tahun 1948 Burma merdeka dan Arakan dengan Muslim Rohingnya tetap menjadi bagian dari negaranya. Tahun 1962 Burma dikuasai oleh Junta Militer yang condong pada komunis China-Rusia. Junta Militer berambisi menghabisi Muslim Rohingya. Tiga ratus ribu Muslim Rohingya diusir ke Bangladesh. Sedangkan tahun 1978 lebih dari setengah juta Muslim Rohingya kembali diusir dari Burma.

Sebenarnya, pernyataan mereka bukan etnis asli Myanmar sebagai legitimasi dilakukannya penindasan terhadapnya adalah tidak masuk akal. Itu tidak lain hanyalah permainan opini dengan menyelipkan kebenaran fakta. Rohingya bukan bagian dari etnis Burma adalah benar, tetapi Rohingya bukan bagian dari negara Myanmar adalah salah total. Karena mereka sudah menempati wilayah yang menjadi bagian dari Myanmar jauh hari sebelum Myanmar merdeka. Lantas, mengapa penindasan terhadap Rohingya ini terus berlanjut di bawah bayang-bayang ketidakrasionalan tindakan?.

Faktor Penyebab Konflik Rohingya

Berikut ini adalah faktor-faktor kronologis penyebab konflik Rohingya dari surat kabar Myanmar dan dari beberapa media internasional. Surat kabar The New Light of Myanmar edisi 4 Juni 2012 2, melaporkan satu berita mengenai pemerkosaan dan pembunuhan seorang gadis oleh tiga orang pemuda:

Pertama, pada tanggal 4 Juni, terjadi insiden pemerkosaan dan pembunuhan, dalam perjalanan menuju rumah dari tempat bekerja sebagai tukang jahit, Ma Thida Htwe, seorang gadis Buddha berumur 27 tahun, putri U Hla Tin, dari perkampungan Thabyechaung, Desa Kyauknimaw, Yanbye, ditikam sampai mati oleh orang tak dikenal. Lokasi kejadian adalah di hutan bakau dekat pohon alba di samping jalan menuju Kyaukhtayan pada tanggal 28 Mei 2012 pukul 17:15.

Kasus tersebut kemudian dilaporkan ke Kantor Polisi Kyauknimaw oleh U Win Maung, saudara korban. Kantor polisi memperkarakan kasus ini dengan Hukum Acara Pidana pasal 302/382 (pembunuhan / pemerkosaan). Lalu Kepala kepolisian distrik Kyaukpyu dan personil pergi ke Desa Kyauknimaw pada 29 Mei pagi untuk pencarian bukti-bukti lalu menetapkan tiga tersangka, yaitu Htet Htet (a) Rawshi bin U Kyaw Thaung (Bengali/Muslim), Rawphi bin Sweyuktamauk (Bengali/Muslim) dan Khochi bin Akwechay (Bengali/ Muslim).

Penyelidikan menunjukkan bahwa Htet Htet (a) Rawshi tahu rutinitas sehari-hari korban yang pulang-pergi antara Desa Thabyechaung dan Desa Kyauknimaw untuk menjahit. Menurut pengakuannya dia berbuat dipicu oleh kebutuhan uang untuk menikahi seorang gadis, dan berencana untuk merampok barang berharga yang dipakai korban. Bersama dengan Rawphi dan Khochi, Rawshi menunggu di pohon alba dekat tempat kejadian. Tak lama Ma Thida Htwe yang diincarnya datang dan berjalan sendirian, ketiganya lalu menodongkan pisau dan membawanya ke hutan. Korban lalu diperkosa dan ditikam mati, tak lupa merenggut lima macam perhiasan emas termasuk kalung emas yang dikenakan korban.

Untuk menghindari kerusuhan rasial dan ancaman warga desa kepada para tersangka, aparat kepolisian setempat bersiaga dan mengirim tiga orang pelaku tersebut ke tahanan Kyaukpyu pada tanggal 30 Mei pukul 10.15. Pada pukul 13:20 hari yang sama, sekitar 100 warga dari Rakhine Kyauknimaw tiba di Kantor Polisi Kyauknimaw dan menuntut agar tiga orang pelaku pembunuhan diserahkan kepada mereka namun dijelaskan oleh pihak kepolisian bahwa mereka sudah dikirim ke tahanan. Massa yang mendatangi kepolisian tidak puas dengan itu dan berusaha untuk masuk kantor polisi. Polisi terpaksa harus menembakkan lima tembakan untuk membubarkan mereka. Pada pukul 13:50 100 warga Rakhine Desa Kyauknimaw lalu meninggalkan kantor polisi menuju Kantor Pemerintahan untuk menyampaikan keinginannya dengan diikuti oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadi keributan. Pukul 16.00, para pejabat tingkat Kota menerima dan

memberikan klarifikasi untuk menghindari kerusuhan, dan penduduk desa meninggalkan kantor pada pukul 17:40.

Keesokan harinya, 31 Mei pukul 9 pagi, mereka meninggalkan Yanbye ke Desa Kyauknimaw dengan dua perahu. Mereka pulang dengan membawa santunan sebesar 1 juta Kyat (mata uang Myanmar) untuk desa dari Menteri Perhubungan, U Kyaw Khin, 600.000 Kyat dan lima set jubah untuk pemakaman korban serta ditambah 100.000 Kyat dari santunan perwakilan negara. Pada 31 Mei 15:05 Menteri Dalam Negeri dan Keamanan Perbatasan Negara, wakil kepala Kantor Polisi, Kabupaten Kyaukphyu dan Kepala Kantor Polisi Distrik berpartisipasi dalam pemakaman korban dan mengadakan diskusi dengan penduduk desa. Pada 1 Juni pukul 9 pagi Kepala Menteri Negara dan partai di Kyaukphyu mengadakan diskusi dengan organisasi pemuda Kyaukphyu atas kasus pembunuhan tersebut. Diskusi-diskusi terutama menyinggung menjatuhkan hukuman jera pada para pembunuh dan membantu mencegah kerusuhan saat mereka sedang diadili.”

Kedua, terjadi insiden yang menewaskan 10 orang muslim di dalam bus. Menurut berita harian New Light dan beberapa blog orang Myanmar menyebutkan bahwa beredar foto-foto dan informasi bahwa “menurut bukti forensik polisi dan juga saksi mata yang melihat tubuh korban, ia diperkosa beberapa kali oleh tiga pemuda Bengali Muslim dan tenggorokannya digorok, dadanya ditikam beberapa kali dan organ wanitanya ditikam dan dimutilasi dengan pisau. Setelah itu lebih dari seribu massa marah dan hampir menghancurkan kantor polisi di mana tiga pelaku ditangkap. Lalu kasus terburuk dan pemicu tragedi Rohingya adalah pembantaian terhadap 10 orang Muslim peziarah yang ada dalam sebuah bus di Taunggup dalam perjalanan dari Sandoway ke Rangoon pada tanggal 4 Juni.”

Koran New Light Myanmar edisi 5 Juni 3 memberitakan rincian mengenai pembunuhan sepuluh orang Burma Muslim oleh massa Arakan sebagai berikut: “Sehubungan dengan kasus Ma Thida Htwe yang dibunuh kejam pada tanggal 28 Mei, sekelompok orang yang terkumpul dalam Wunthanu Rakkhita Association, Taunggup, membagi-bagikan selebaran sekitar jam 6 pagi pada 4 Juni kepada penduduk lokal di tempat-tempat ramai di Taunggup, disertai foto Ma Thida Htwe dan memberikan penekanan bahwa massa Muslim telah membunuh dan memperkosa dengan keji wanita Rakhine. Sekitar pukul 16:00, tersebar kabar bahwa ada mobil yang berisikan orang Muslim dalam sebuah bus yang melintas dari Thandwe ke Yangon dan berhenti di Terminal Bus Ayeyeyiknyein. Petugas terminal lalu memerintahkan bus untuk berangkat ke

Yangon dengan segera. Bus berisi penuh sesak oleh penumpang. Beberapa orang dengan mengendarai sepeda motor mengikuti bus. Ketika bus tiba di persimpangan Thandwe-Taunggup, sekitar 300 orang lokal sudah menunggu di sana dan menarik penumpang yang beridentitas Muslim keluar dari bus. Dalam bentrokan itu, sepuluh orang Islam tewas dan bus juga hancur.

Konflik sejak insiden 10 orang Muslim terbunuh terus memanas di kawasan Arakan, Burma, muslim Rohingya menjadi sasaran. Seperti dilansir media Al-Jazeera, Hal ini dipicu juga oleh bibit perseteruan yang sudah terpendam lama, yaitu perseteruan antara kelompok etnis Rohingya yang Muslim dan etnis lokal yang beragama Buddha. Rohingya tidak mendapat pengakuan oleh pemerintah setempat. Ditambah lagi agama yang berbeda. Dari laporan berbagai berita sampai saat ini sejak insiden tersebut sudah terjadi tragedi pembantaian etnis Rohingya (yang notabene beragama Islam) lebih dari 6000 orang.

Di saat kaum Muslim lain sedang khitmad menjalankan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadhan, kaum Muslim Rohingya malah dilanda konflik. Tercatat, delapan puluh jiwa Muslim Rohingya melayang karena terbunuh dan seratus ribu orang putus asa. Mereka meninggalkan tempat tinggalnya dan mengungsi ke negara-negara tetangga.Ubaidah Katun adalah salah satu Muslimah Rohingya yang berhasil melarikan diri ke Bangladesh.

Ubaidah Katun menuturkan bahwa jenazah Muslim di Arakan tidak sempat dikuburkan. Jenazah di sana dimasukkan ke dalam gerobak dan dibawa ke suatu tempat yang tidak dapat diketahui oleh otoritas setempat. Jiwanya terbelenggu oleh dua pilihan, antara menghormati jenazah sebagai pengamalan Islam yang diyakininya dan menyelamatkan jiwanya jika ia tidak segera melarikan diri dari kampung halamannya sendiri. Ubaidah juga menuturkan hal yang lainnya. Di Arakan, sudah tidak ada lagi yang bisa dimakan, Muslim yang kelaparan terpaksa makan batang pohon pisang. Hal ini masuk akal karena menurut Abdul Kalam (seorang Muslim yang juga berhasil melarikan diri ke Bangladesh), mereka di sana dihalang-halangi untuk pergi ke pasar, belanja barang kebutuhan sehari-hari. Bahkan, mereka yang hendak pergi untuk bekerja dihalang-halangi. Jika ketahuan hendak pergi bekerja, mereka dilempari bom molotov. Itulah sekelumit fakta konflik yang melanda Muslim Rohingya.

Baiknya memang isu agama dikesampingkan, karena memang bukan itu inti permasalahannya. Di Myanmar sendiri etnis Rohingya tidak diakui sebagai bagian dari bangsa Birma, bahkan ketika junta militer mengubah nama negaranya dari Bhurma (Birma) menjadi Myanmar, supaya etnis lain non-birma menerima integrasi dalam satu

bangsa Myanmar. Etnis Rohingya tidak diakui pemerintah junta militer, mereka tak diberi kartu identitas warga negara. Etnis Birma yang menjadi mayoritas di Myanmar pun menyebut etnis Rohingya sebagai "suku Bengali", menunjukan mereka tidak menerima etnis Rohingya sebagai salah satu etnis di Myanmar. Mereka menganggap etnis Rohingya itu "pendatang haram" dari Bangladesh, walau fakta sejarahnya etnis Rohingya telah ada di tanah itu (Rakhine state) selama ratusan tahun berdampingan dengan burmanese lainnya.

Peran Lembaga Dunia dan Indonesia

Organisasi semacam ASEAN, Organisasi Konferensi Islam (OKI), dan PBB nyaris belum memberikan langkah tegas menyikapi pelanggaran HAM berat oleh junta militer Myanmar. Pembantaian Muslim Rohingya di Myanmar telah terjadi sejak Juni 2012 sehingga mengakibatkan ratuan ribu Muslim Rohingya mengungsi meninggalkan tanah airnya di Rakhine. Muslim Rohingya sebagai minoritas di negara mayoritas beragama Buddha itu tidak dianggap sebagai warga negara sehingga pemimpin junta militer Myanmar, Jenderal Thein Sein, menyuruh agar Muslim Rohingya mencari negara ketiga untuk menjadi tempat tinggal. Suatu kenyataan yang mempertegas upaya terjadinya genosida di bumi Myanmar atas saudara Muslim Rohingya.

Secara khusus, Indonesia sebagai anggota OKI berkepentingan mendesak PBB untuk memberi sanksi tegas terhadap pemimpin Myanmar dengan mengajukan ke *International Criminal Court* (ICC) atas tuduhan upaya genosida secara sistematis terhadap Muslim Rohingya. Tragedi kemanusiaan yang menimpa Muslim Rohingya di Myanmar jelas merupakan amanat penderitaan Muslim internasional bersamaan dengan nilai spiritual puasa Ramadhan.

Puasa sebagai ritual yang semula untuk ikut merasakan penderitaan kaum miskin yang tak mampu makan layak di setiap harinya, harus ditransformasi sebagai spirit kemanusiaan atas nama ketidakadilan yang merampas hak-hak kemanusiaan. Oleh karena itu, puasa merupakan bagian dari implementasi penerimaan atas *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR), dokumen internasional yang menjadi standar pencapaian hak asasi yang berlaku untuk semua rakyat dan semua negara di dunia agar tidak ada penindasan dengan dalih apa pun.

Pada dasarnya, belum jelasnya tindakan-tindakan responsif dari dunia internasional mencerminkan pembelaan nilai-nilai humanisme dalam membela rakyat dan sebagai ruh

perjuangan bersama masyarakat dunia berjalan tidak berimbang. Betapa masyarakat internasional sudah terlalu sering dijanjikan oleh PBB dalam penyelesaian kasus-kasus HAM yang selalu menyandera.

Myanmar semestinya ingat akan komitmennya terhadap demokrasi, bahkan Pemerintah Indonesia bisa member contoh dan mengajari tentang bagaimana demokrasi berbangsa dan bernegara. Demokrasi bukan hanya secara prosedural dengan membolehkan oposisi Aung San Suu Kyi untuk bisa mengikuti pemilu, melainkan yang terpenting adalah substansi demokrasi itu sendiri yang terkait erat dengan HAM, baik hak pribadi, hak sipil dan politik, hak ekonomi, sosial, dan budaya, maupun hak humaniter dalam statusnya sebagai warga negara.

Capaian substansi demokrasi dengan menerima Muslim Rohingya sebagai warga negara Myanmar, jelas akan dicatat sebagai capaian besar dalam proses demokratisasi negara tersebut dan akan menjadi pijakan sangat penting dalam mengelola pluralitas masyarakat Myanmar. Namun, jika pembantaian terus berlangsung dan terjadi pengingkaran keberadaan warga minoritas, Pemerintah Myanmar dan juga Aung San Suu Kyi sebagai simbol demokratisasi Myanmar, sama halnya berjalan di tempat dan gagal dalam penegakan nilai-nilai demokrasi dan kemanusiaan.

Sebagaimana Sandra Fredman menyatakan, usaha-usaha untuk melegitimasi dominasi dalam konteks sosial hanya akan membawa subordinasi oleh satu kelompok sosial terhadap kelompok sosial yang lain berupa rasisme. Hak-hak individu jelas akan selalu berkaitan dengan hak-hak kelompoknya. Jika hak-hak kelompok itu tidak terpenuhi atau terampas oleh dominasi kekuasaan lain, niscaya hak-hak individual anggota kelompok juga ikut terampas. Inilah babak yang mengkhawatirkan ketika tidak adanya penghargaan kaum minoritas Muslim Rohingya yang justru diinisiasi oleh pemegang kekuasaan Pemerintah Myanmar.

Oleh karena itu, semestinya setiap warga negara dalam kedudukannya di hadapan hukum politik dan hukum internasional diperlakukan secara sama, sebagaimana puasa Ramadhan yang melatih untuk sama-sama merasakan penderitaan kelompok minoritas yang termarginalkan. Persoalan memperlakukan pluralitas dan kemajemukan masyarakat serta merumuskan program integrasi sosial dapat bercermin pada yang terjadi di Indonesia.

Dengan demikian, Indonesia bisa menjadi model berdemokrasi, bagaimana mengelola perbedaan-perbedaan antara mayoritas dan minoritas tanpa harus melalui konflik berkepanjangan. Tragedi kemanusiaan terhadap Muslim Rohingya mesti menjadi

semangat bagi seluruh kalangan masyarakat internasional membangun solidaritas untuk selalu mendesak agar tidak adanya penindasan terhadap kelompok minoritas. Dan, Indonesia dapat memainkan peran diplomasi kemanusiaan di garda terdepan.

Aung San Suu Kyi, HAM, dan Etnis Rohingya

Pejuang HAM tidak diam terhadap penindasan Rohingya. Setidaknya hal ini dibuktikan dengan laporan berjudul *Crisis in Arakan State* yang ditulis oleh Wiliam Hague MP, sekretaris Foreign and Commonwealth yang bermarkas di Jalan King Charles, London. Laporan itu ditulis di situs webnya Burma Campaign UK 4. Situs ini sarat akan dukungannya kepada Aung San Suu Kyi untuk memperjuangkan HAM, Kebebasan, dan Demokrasi untuk Myanmar.

Di dalam laporan tersebut disebutkan bahwa telah terjadi krisis kemanusiaan di Arakan terhadap etnis Rohingya dengan tidak cukup mendapat perhatian dari dunia Internasional. Polisi Myanmar, pasukan keamanan, dan tentara memerkosa, menjarah, menyiksa, dan sewenang-wenang membunuh orang Rohingya. Ada penangkapan massal terhadap orang-orang Rohingya. Mereka di simpan ke dalam kamp-kamp penahanan tanpa pengadilan, tanpa makanan dan pelayanan medis. Seratus ribu orang kehilangan tempat tinggal. Sikap Aung San Suu Kyi terhadap konflik Rohingya bisa dilihat di situs web terebut. Pada tanggal 25 Juli untuk pertama kalinya, ia membuat pernyataan di parlemen Myanmar terkait kasus Rohingya. Aung menyerukan dilakukan perlindungan hukum terhadap etnis minoritas.

Kepentingan Barat

Ada kesamaan pandangan antara Aung San Suu Kyi dan Barat, dalam hal ini Amerika Serikat dan sekutunya. Keduanya sama-sama memperjuangkan HAM, Kebebasan, dan Demokrasi. Skenario pertama, kehadiran Aung San Suu Kyi yang pernah mengenyam pendidikan di Oxford University ini adalah agen Barat untuk menjalankan Demokratisasi di Myanmar.

Di tulisan ini, makna Demokrasi hanya dibatasi dengan konteks berlakunya Demokrasi di negara-negara berkembang. Tidak akan disampaikan teori-teori Demokrasi menurut para filsuf maupun ulama dunia. Nyatanya, Demokrasi di negara-negara

berkembang tidak hanya implikasi dari antithesis kediktatoran. Lebih dari itu, Demokrasi adalah wahana transaksi antar pemangku kepentingan dalam wujud duduknya wakil-wakil rakyat di parlemen. Di tulisan ini Demokrasi digambarkan dengan “*Lu punya proyek gak? Gw bawa duit*”. Setidaknya, itulah yang terjadi di Afganistan, Iraq dan negara-negara lainnya setelah diktator mereka digulingkan, Demokrasi adalah jalan bagi Barat untuk menguasai kekayaan alam yang ada di Myanmar.

Agar Demokratisasi Myanmar berjalan mulus, diktator Junta Militer harus digulingkan. Diperlukan kemampuan dan kekuatan rakyat untuk menggulingkan Junta. Jalan lainnya adalah tekanan internasional terhadap Junta. Yaitu dengan menjadikan Rohingya sebagai potensi konflik. Sehingga nantinya Junta Militer mendapat tekanan dari masyarakat internasional bahwa dirinya telah melakukan pelanggaran HAM berat terhadap konflik Rohingya. Kekuasaannya harus disudahi.

Itikat ini sudah dijalankan. Lanjutan dari isi laporan *Crisis in Arakan State* menyebutkan usulan-usulan yang bisa dilakukan Barat, dalam hal ini Inggris. Kepada Inggris mereka mengusulkan agar Inggris memimpin dunia internasional untuk memastikan bahwa bantuan dapat tersalurkan ke Muslim Rohingya, menghentikan pelanggaran hak asasi manusia dan menangkap pelaku-pelakunya, serta membolehkan orang-orang Rohingya untuk kembali ke rumahnya masing-masing. Inggris harus memobilisasi masyarakat Internasional untuk menekan presiden Thein Sein. Kesimpulannya, konflik Rohingya adalah skenario Barat untuk mendapatkan proyek-proyek strategis Arakan dan Myanmar pada umumnya.

Skenario Kedua

Menariknya, masih di laporan *Crisis in Arakan State* juga, terungkap bahwa Presiden Myanmar mengusulkan beberapa kebijakan untuk membersihkan etnis Rohingya, menugaskan PBB untuk mengirim orang-orang Rohingya ke tempat-tempat pengungsian, menghapus dari Myanmar dan mengirim mereka ke dunia ketiga. Dari laporan ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa presiden Thein Sein memang membiarkan terjadinya konflik Rohingya.

Arrahmah.com menghadirkan fakta lain mengenai konflik Rohingya ini. Arrahmah mengambil informasi dari Global Islam Media Front (GIMF) yang diterjemahkan oleh tim *Maktabah Jahizuna*. Di sana dibeberkan kronologi terjadinya konflik yang sama sekali

berbeda dengan kronologi versi harian *The New Light of Myanmar*. Pernyataan *The New Light of Myanmar* bahwa pelaku pembunuhan seorang gadis Budha adalah tiga pemuda Bengali Muslim adalah bohong. Yang benar adalah, gadis tadi dibunuh oleh pacarnya dan beberapa pemuda geng Budha Rakhine. Pembunuhan ini diawali saat gadis tadi ingin “putus” dari pacarnya dikarenakan dia jatuh hati pada laki-laki lain. Sang lelaki membujuk agar tidak putus. Bujukannya ditolak. Sang mantan pacar marah dan mengajak temannya untuk membalas dendam dengan memperkosa dan membunuh sang gadis.

Lalu para pembunuh itu meletakkan mayat gadis itu di dekat desa Muslim. Kemudian orang-orang Budha Rekhine dan otoritas setempat menuding orang-orang Muslim membunuh gadis itu. Ketika pemuda muslim yang tidak bersalah ditangkap. Satu dipukuli hingga tewas dan dua pemuda lainnya dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan. Jika dibandingkan dengan kronologi konflik versi *The New Light of Myanmar* di awal pembahasan, memang pemuda Muslim yang dituding menjadi pelaku tidak diizinkan dipertemukan dengan seratus warga yang mendatangi kantor kepolisian. Ada kemungkinan, polisi tersebut sudah didekati oleh otoritas yang lebih tinggi agar kebenaran sesungguhnya tidak terungkap.

Dari informasi-informasi tersebut di atas ada kemungkinan skenario konflik ini diinginkan dan dikendalikan oleh otoritas Myanmar dan China. Hal ini didukung dari laporan *Burma Champaign UK*, bahwa presiden Thein mengusulkan tiga usulah, yaitu pembersihan etnis Rohingya dari wilayah Burma, menugaskan PBB mengirim Muslim Rohingya ke tempat-tempat pengungsian, atau mengirim mereka ke dunia ketiga lain. Ini adalah scenario kedua, dimana Junta Militer dan China berkuasa terhadapnya.

Pertanyaannya, mengapa etnis Rohingya harus dibersihkan dari bumi Myanmar? Adanya etnis Rohingya di Arakan oleh Barat dijadikan potensi terjadinya konflik. Karena dengan konflik itulah mereka dapat menyuarakan kejahatan perang, pelanggaran HAM berat oleh Junta seperti apa yang sudah diuraikan di skenario pertama. Untuk menghapuskan potensi konflik, etnis Rohingya harus dibersihkan dari daerah konflik. Begitulah cara berpikir Junta dan China.

Pertanyaan berikutnya, bukankah dengan menghapuskan etnis Rohingya dari daerah konflik sama saja dengan mengundang kekuatan Barat dengan HAM, Kebebasan, dan Demokrasinya?. Di sinilah letak kehebatan skenario kedua, Junta merekayasa konflik bahwa seakan-akan dia tidak bersalah. Junta telah cuci tangan terhadap konflik ini dengan

menggesernya menjadi konflik agama. Burma yang Budha diprovokasi dengan setting kronologi di atas agar melakukan penindasan terhadap Rohingya yang Muslim.

Melalui skenario kedua ini, Junta memetik dua hal. Pertama, rakyat seakan berdiri dalam satu barisan dengan Junta menentang entis Rohingya, dengan dalih bukan etnis asli Myanmar. Kedua, Junta berhasil mengecoh Barat dalam hal ini Amerika Serikat dengan membungkamnya untuk tidak menyuarakan kejahanan perang, pelanggaran HAM berat, Kebebasan, dan Demokrasi. Mengapa? Karena bagaimanapun penderitaannya, Rohingya tetap Muslim. Sedangkan sekarang sudah menginjak tahun 2012. Tahun ajang adu kampanye di negara Amerika Seikat. Lihatlah beberapa koran-koran Amerika. Donald Trump mendukung Romney, Romney menantang Obama dengan slogannya, “better America”. Aksi yang dilakukan Obama untuk Myanmar kurang strategis untuk mendukung pencalonannya karena, Rohingya adalah Muslim dan Amerika untuk sampai hari ini masih mengidap Islamophobia.

Nampaknya, Barat dengan Amerika Serikatnya harus mengakui kediktatoran Junta. Rohingya akan tetap dipukul mundur hingga meninggalkan daerah konflik di Arakan. Sedangkan China sebagai sponsor utama Junta akan menikmati proyek jalur pipa tanpa resistensi dari Amerika Serikat. Bahkan China akan menikmati pemangkasan biaya pengadaan minyak dan gas karena mereka tidak harus menyalurkan dana operasional pengadaan minyak dan gas melalui laut China Selatan, selat Malaka, hingga selat Hormus atau Mediterania karena jalur pengadaan minyak dan gas sudah dipotong ketika jalur pipa Shwe-Kumning telah berhasil diciptakan.

Kesimpulan

Arakan adalah nama sebuah provinsi di negara Myanmar dan Rohingya adalah nama etnis yang tinggal di sana. Rohingya sedang dilanda konflik. Menurut laporan *The New Light of Myanmar*, sebuah koran yang terbit di negara Myanmar tertanggal 4 Juni 2012, konflik Rohingya bermula dari sebuah pembunuhan seorang gadis Budha. Ma Thida Htwe adalah anak perempuan U Hla Tin yang berumur 27 tahun, hidup di sebuah desa bernama Thabyechaung, Kyauknimaw, daerah Yanbye. Pada tanggal 28 Mei 2012 sore, Thida hendak pulang ke rumah setelah sehari bekerja di sebuah Taylor. Tepat pukul 17:15 waktu setempat, ia ditikam oleh orang yang tak dikenal di hutan Bakau samping jalan tanggul menuju Kyaukhtayan, bagian dari desa Kyauknimaw dan Chaungwa.

Kasus ini dibawa ke pihak kepolisian dan setelah penyelidikan ditetapkan beberapa tersangka. Mereka adalah Htet Htet (a) Rawshi, putra U Kyaw Thaung (Bengali / Islam), dari Kyauknimaw (selatan bangsal), Rawphi, anak Sweyuktamauk (Bengali / Islam) dari Kyauknimaw (Thaya bangsal) dan Khochi, anak Akwechay (Bengali / Islam), dari Kyauknimaw (Thaya bangsal). Hasil investigasi menyebutkan bahwa Htet Htet (a) Rawshi tahu rutinitas sehari-hari korban yang pulang-pergi antara Desa Thabyechaung dan Desa Kyauknimaw untuk menjahit. Saat itu, dia sedang membutuhkan uang untuk menikahi seorang gadis.

Untuk itulah dia bersama kedua rekan tersangka lainnya merampok perhiasan yang dikenakan seorang gadis tersebut dan kemudian dibunuhnya. Berita ini menyebar luas di kalangan penduduk sekitar. Untuk menghindari kerusuhan rasial, tim MPF yang memantau situasi di sana mengirim ketiga pemuda tersebut ke penjara pada pukul 10:15 tanggal 30 Mei. Pada hari yang sama, pada pukul 13:20 seratus orang warga Kyauknimaw mendatangi kantor polisi dan meminta mengembalikan ketiga pemuda tersebut untuk dimintai penjelasan sebelum dikirim ke penjara. Mereka tidak puas dengan penjelasan polisi dan berusaha masuk ke kantor polisi. Polisi menembakkan lima kali tembakan untuk membubarkan mereka.

The New Light of Myanmar yang terbit pada hari berikutnya, 5 Juni menyebutkan bahwa beredar foto-foto hasil penyelidikan tim forensik bahwa sebelum dibunuh, ternyata korban sempat diperkosa oleh ketiga pemuda Bengali Muslim tadi. Korban juga digorok tenggorokannya, dadanya ditikam beberapa kali dan organ kewanitaannya ditikam dan dimutilasi dengan pisau. Foto-foto tersebut semakin menambah kemarahan warga yang beragama Budha. Dengan dalih bahwa Rohingya bukanlah etnis asli Myanmar, mereka yang terprovokasi melakukan penindasan-penindasan terhadap Rohingya. Mereka tidak menginginkan kehadiran etnis tersebut di bumi Arakan. Bahkan seorang biksu Budha yang fotonya tenar di sosial media menyerukan untuk menghalau bantuan kemanusiaan untuk etnis Rohingya, “Rohingya no”.

Namun, Arrahmah.com menghadirkan fakta lain mengenai konflik Rohingya ini. Terdapat perbedaan kronologi terjadinya konflik dengan kronologi versi harian *The New Light of Myanmar*. Pernyataan *The New Light of Myanmar* bahwa pelaku pembunuhan seorang gadis Budha adalah tiga pemuda Bengali Muslim adalah bohong. Kebenarannya adalah, gadis tadi dibunuh oleh pacarnya dan beberapa pemuda geng Budha Rekhine. Pembunuhan ini diawali saat gadis tadi ingin “putus” dari pacarnya dikarenakan dia jatuh

hati pada laki-laki lain. Sang lelaki membujuk agar tidak putus. Bujukannya ditolak. Sang mantan pacar marah dan mengajak temannya untuk membalas dendam dengan memperkosa dan membunuh sang gadis. Yang mana yang benar, waktu akan membuktikannya. Namun, hal yang pasti adalah kematian ribuan Rohingya akibat pembunuhan junta militer Myanmar adalah sesuatu yang tak terbantahkan.

Daftar Pustaka

- Duverger, Maurice, Sosiologi Politik, PT. Rajawali Grafindo Persada, Jakarta, 1998.
http://www.mizan.com/news_det/mengenal-etnis-rohingya-dari-sudut-pandangsejarah.html
<http://forum.detik.com/sema-tentang-konflik-rohingya-arakan-di-myanmar-peran-indonesia-dalam-t474416p25.html>
<http://politik.kompasiana.com/2012/08/09/analisis-politik-konflik-rohingya/>